

Implementasi *Public Relations* Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam Mewujudkan Provinsi Layak Anak

Muhammad Fikri Sabarsyah*, Maman Suherman

Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fikri8sabarsyah@gmail.com, mamansuherman.unisa@gmail.com

Abstract. This research is backgrounded by Law No. 35 of 2014 which states that every child has the right to live, grow and develop, participate and receive protection from violence and discrimination. This research uses the theory of Cutlip and Center (1961) which suggests 4 (four) stages of the public relations process, namely: fact finding, planning and programming, communicating and evaluating. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. The results of the research on the Implementation of Public Relations of the West Java Regional Children's Forum (FAD JABAR) in Realizing a Child Friendly Province (Provila) is in accordance with the 4 stages of the public relations process whose implementation is supported by the role of the West Java Provincial Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning, Facilitators and agencies related to child protection. The most important aspect in the implementation of public relations for this children's forum is that children are given the opportunity to express their aspirations/opinions and have their opinions heard in realizing a province that is suitable for children.

Keywords: *Implementation of Public Relations, FAD JABAR, Child Friendly Province.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang – undang nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan setiap Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Sebagai wadah aspirasi anak, komunikasi internal maupun eksternal harus berjalan dengan baik sesuai harapan organisasi Forum Anak yang dapat dikendalikan melalui public relations yang memantau jalannya informasi yang masuk maupun keluar organisasi Forum Anak di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori Cutlip dan Center (1961) yang mengemukakan 4 (empat) tahapan proses public relations yaitu: fact finding, planning and programming, communicating dan evaluating. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Public Relation Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam Mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) sesuai dengan 4 tahap proses public relations yang implementasinya didukung oleh peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Fasilitator maupun dinas instansi terkait perlindungan anak. Aspek yang terpenting dalam implementasi public relations forum anak ini adalah anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan aspirasi/pendapatnya dan didengar pendapatnya dalam mewujudkan provinsi yang layak bagi anak.

Kata Kunci: *Implementasi Public Relations, FAD JABAR, Provinsi Layak Anak.*

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus suatu bangsa, perlu diperhatikan tumbuh kembangnya terutama dalam pemenuhan hak dasar anak. Hak-hak anak tersebut diakui, dan dijamin perlindungan serta pemenuhannya oleh negara dalam *Convention on The Rights of The Children* atau Konvensi Hak Anak (KHA). Pasal yang menjadi dasar pengembangan KLA dalam UU. No. 35 Nomor 35 Tahun 2014 yaitu. Pasal 21 yang menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dengan membangun KLA; Pasal 22 yang menyebutkan Pemda memiliki kewajiban dan tanggung jawab memfasilitasi sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak; Pasal 24 menyebutkan Pemda menjamin hak Anak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan Pasal 72 yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Komunikasi yang berjalan dengan baik sesuai harapan organisasi Forum Anak dapat dikendalikan melalui *public relations* yang memantau jalannya informasi yang masuk dan keluar organisasi FA. Informasi perlu ditata dan dikelola dengan tepat agar tidak salah arah dan salah sasaran. Lindeborg (1994) berpendapat bahwa komunikasi yang dikelola secara strategis, memenuhi tujuannya, dan menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan publik akan membentuk suatu komunikasi yang unggul. *Public relations* perlu dilakukan oleh lembaga dengan ada bagian yang mengelola secara profesional. Lebih jauh sesungguhnya *public relations* merupakan suatu pendekatan yang perlu dijalankan oleh organisasi FA dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Artinya, *public relations* merupakan tanggung jawab setiap anggota organisasi FA, sehingga setiap anggota organisasi sebenarnya merupakan seorang “praktisi” *public relations* bagi organisasinya. Pemaknaan atas *public relations* tersebut akan berkontribusi bagi pengembangan organisasi dan *public relations* itu sendiri. (Aswad Ishak :2012).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengetahui proses implementasi Public Relation Forum Anak Jawa Barat dalam mewujudkan Provinsi layak anak.

Bonham Public Relation didefinisikan sebagai seni menciptakan pemahaman publik yang lebih baik untuk memperdalam kepercayaan public terhadap seseorang atau organisasi/badan. Dari definisi tersebut dapat dianalisis bahwa PR pada dasarnya menekankan pada “seni”, seni disini berarti seni dalam kaitannya dengan komunikasi, dimana seorang PRO harus memiliki keterampilan seni komunikasi yang baik dan mampu mendemonstrasikannya, sehingga pencapaian seni ini dapat membawa manfaat bagi reputasi yang baik dari organisasi yang konsisten dengan citra publik yang positif dari organisasi.

Adapun tujuan PR menurut Danandjaja (2011:22), dibagi berdasarkan kegiatannya. Pembagian dari kegiatan public relations yaitu:

Internal Public Relations yang mencakup:

Melakukan penilaian terhadap sikap tingkah laku dan opini publik terhadap perusahaan, terutama sekali ditujukan kepada kebijaksanaan perusahaan yang sedang dijalankan.

Melakukan suatu analisa dan penyempurnaan kebijakan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan tidak melupakan kepentingan umum.

Memberikan penerangan kepada publik karyawan tentang tujuan dan kebijakan perusahaan mengenai berbagai operasi rutin dan menjelaskan perkembangan perusahaan. Apa langkah selanjutnya adalah pegawai negeri untuk tetap mendapat informasi dengan baik.

Merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif untuk tugas-tugas yang bersifat internal public relations dalam perusahaan. Berdasarkan seorang pimpinan harus selalu mengutamakan kepentingan umum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang public relation pun harus bersifat obyektif agar publik tetap mau menerima kebijakan perusahaan dengan sikap terbuka.

Eksternal Public Relations

Tujuan dari public relations berdasarkan kegiatan eksternal relations adalah untuk mendapatkan dukungan dari publik. Dalam praktiknya, tujuan eksternal *public relations* yakni menyelenggarakan komunikasi yang efektif, informatif dan persuasif, guna meraih dukungan publik atau bahkan mengubah opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Adapun istilah informatif itu sendiri, dalam kegiatan komunikasinya, dimaksudkan agar seorang petugas public relation harus dapat memahami dengan jelas pesan komunikasi yang disampaikan kepada public. Sehingga pada tahap selanjutnya, setelah menerima pesan komunikasi, tidak terjadi ketidaksepakatan publik. Kemudian ungkapan persuasif sendiri dimaksudkan bahwa seorang petugas *public relations* tidak dapat dipaksa untuk mempengaruhi publik melalui penyajian pesan komunikasi yang disampaikannya. Artinya, ketika kata-kata dapat mempengaruhi publik, penyajian pesan komunikasi itu harus mampu membangkitkan kesadaran dalam diri publik sehingga dikemudian hari, ketika public mengadakan aksi, seolah-olah kegiatan yang dilakukannya timbul atas kehendaknya sendiri, bukan akibat dari penerimaan pesan komunikasi itu.

Menurut buku *Dasar - Dasar Public Relations*, Cutlip dan Center (1961) mengemukakan tentang tahap-tahap proses operasional *public relations* yakni :

1. Tahap *Fact – Finding* yaitu : mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Tahap *Planning dan Programming* yaitu : tahap merencanakan dan membuat program sesuai dengan apa yang telah diketahuinya dalam tahap *Fact – Finding*.
3. Tahap *Communicating* yaitu : Tahap pelaksanaan komunikasi.
4. Tahap *Evaluating* yaitu : tahap melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dari tahap pertama dan berikutnya,

Media sebagai alat pendukung untuk terciptanya komunikasi atau penyampaian pesan yang efektif dibutuhkan seorang *public relation* dalam menjalankan tugasnya, Media *public relations* terdiri media internal seperti koran, website perusahaan, dan financial report serta media eksternal sebagai media massa berbentuk cetak maupun elektronik (Nova,2011). Adapun Abdurrachman (1995) berpendapat bahwa media yang dapat digunakan seorang *public relations* yaitu kata-kata tercetak dan kata-kata lisan. Sedangkan menurut Satlita (2006), dalam menjalankan tugasnya seorang *public relations* menggunakan media sebagai berikut:

1. Media massa cetak maupun elektronik
2. Bahan tercetak (*printed material*)
3. Surat langsung (*direct mail*)
4. Pesan-pesan lisan (*spoken word*)
5. Pemberian sponsor (*sponsorship*)
6. *House journal*
7. Pengiklanan
8. Pertemuan

Inti utama dari inisiatif kota ramah anak menurut Unicef (2004) yaitu kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Adapun hak-hak tersebut yaitu hak untuk mempengaruhi keputusan dan memberikan pendapat tentang kota yang diinginkan; hak untuk dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar, hak untuk mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan hak untuk dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan status penyandang disabilitas. Pasal-pasal kunci UU. No. 35 Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi dasar dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pasal yang menjadi dasar pengembangan KLA dalam UU. No. 35 Nomor 35 Tahun 2014 yaitu. Pasal 21 yang menyebutkan Pemerintah

Daerah (Pemda) berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dengan membangun KLA; Pasal 22 yang menyebutkan Pemda memiliki kewajiban dan tanggung jawab memfasilitasi sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak; Pasal 24 menyebutkan Pemda menjamin hak Anak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan Pasal 72 yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara: sosialisasi dan edukasi mengenai hak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Perlindungan Anak, melaporkan pelanggaran hal Anak kepada pihak berwenang, berkontribusi dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak, memantau, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak, memfasilitasi sarana dan prasarana, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak dan berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban (Hamid Pattilima :2017)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini di tulis dan dilakukan terhadap pengurus Forum Anak Jawa Barat yang merupakan perwakilan Forum Anak Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Adapun implementasi *public relation* forum anak daerah Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak melalui tahapan proses operasional PR yaitu :

Tahap Fact Finding

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait informasi tentang provinsi layak anak para informan mengemukakan bahwa sebelum FADJABAR bergerak membuat program untuk turut membantu provinsi layak anak, terlebih dahulu FADJABAR mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan pengurus kemudian meminta pendapat maupun saran dari pengurus tentang data apa saja yang harus disiapkan. Selanjutnya berdasarkan pendapat dan saran pengurus, pengurus inti FADJABAR mengumpulkan data dengan cara mencari data di web BPS maupun Data/fakta atau informasi terkait provinsi layak anak yang akan disampaikan kepada stakeholders (mitra) Forum Anak menurut para informan didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Data/fakta atau informasi tersebut didapat dengan cara meminta langsung ke DP3AKB Jawa Barat melalui bidang pemenuhan hak anak juga melalui kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang didalamnya terdapat data-data tentang provinsi layak anak. Data tersebut diambil dan dibuat kembali oleh Forum Anak dalam bentuk infografis dan diberi gambar-gambar anak serta bahasanya disesuaikan dengan anak. Data tersebut disampaikan ke stakeholders melalui Instagram dan webinar yang Forum Anak selenggarakan dalam mendukung provinsi layak anak. . Data – data tentang provinsi layak anak yang tidak tersedia sesuai dengan fakta yang ada tersebut dijadikan bahan pertimbangan pengurus FADJABAR untuk merumuskan kegiatan yang akan dilakukan. data – data dan fakta yang diambil sesuai dengan 24 (dua puluh empat) indikator provinsi layak anak. Forum Anak Daerah Jawa Barat juga diberikan informasi terlebih dahulu tentang provinsi layak anak karena salah satu peran Forum Anak Daerah adalah sebagai 2P (Pelopor Pelapor) dalam membantu mewujudkan provinsi layak anak. Adapun tujuan dari provinsi layak anak yaitu terpenuhinya hak – hak anak dan terlindunginya anak-anak dari segala macam tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran melalui 5 (lima) kluster indikator provinsi layak anak yang terdiri dari kluster hak sipil kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dan kesejahteraan dasar, kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster perlindungan khusus. Peran Forum Anak Daerah (FAD) Jawa Barat yaitu sebagai Pelopor, Pelapor dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Forum Anak Daerah (FAD) Jawa Barat dibentuk secara berjenjang dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kota kabupaten sampai tingkat propinsi. Forum Anak Daerah (FAD) Jawa Barat setiap tahunnya menghimpun aspirasi anak-anak dari 27 kota kabupaten. Peran interpreter public relation Forum Anak dalam mewujudkan provinsi

layak anak sangat baik, membantu mensosialisasikan dan membuat program dalam mewujudkan provinsi layak anak yang dikemas secara lebih ramah dalam artian mudah dipahami oleh anak-anaknya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Forum Anak Daerah Jawa Barat menjadi jembatan antara aspirasi anak dengan organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi yang terkait dengan anak baik dari tingkat kota kabupaten sampai propinsi.

Hambatan yang dihadapi oleh FADJABAR pada tahap ini adalah perbedaan persepsi diantara pengurus terkait isu yang dihadapi dalam rangka mewujudkan provinsi layak anak dan juga data/fakta yang tidak ada di KPP PA dan juga DP3AKB Jabar. Sebagai contoh: saat di sepakati terkait dengan isu perkawinan anak ternyata datanya di DP3AKB Jabar tidak ada. Cara mengatasi hambatan yang terjadi FADJABAR melakukan diskusi Kembali secara offline untuk menyamakan persepsi dikalangan pengurus FADJABAR, untuk data/fakta terkait isu yang akan disampaikan pengurus FADJABAR melakukan diskusi dengan pendamping untuk cari informasi terkait data yang dibutuhkan, seperti tentang perkawinan anak, data/ fakta yang dibutuhkan ada di bawah Pengadilan Negeri untuk itu, kami melakukan audiensi dengan pengadilan negeri sekaligus meminta data terkait perkawinan anak.

Tahap Planning dan Programming

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan tahap merencanakan dan membuat program sesuai data dan fakta yang telah dibuat FADJABAR, pada tahap ini FADJABAR merencanakan apa yang akan dilakukan dengan merumuskan kegiatan seperti sosialisasi perkawinan anak, pentingnya hak identitas atau akte kelahiran bagi anak, kampanye stop kekerasan pada anak. Kegiatan tersebut dicatat dan dirumuskan tujuannya, waktu pelaksanaannya, tempat kegiatannya, anggaran yang dibutuhkan dan anak-anak yang terlibat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Cara *public relations* Forum Anak Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak biasanya memanfaatkan media sosial yang ada seperti Instagram, podcast, website, siaran radio maupun pertemuan langsung dengan memakai standar Kesehatan seperti memakai masker, membawa handsanitizer dan bawa minuman sendiri.

Hambatan yang dihadapi pada tahap *planning dan programing* menurut para responden yaitu agak sulit pengurus FADJABAR merumuskan kegiatan yang inovatif dan kreatif yang bisa menjadi acuan bagi forum anak kota kabupaten untuk mengikuti jejak Jawa Barat. Cara mengatasi kesulitan tersebut pengurus mencoba merumuskan kegiatan dengan penyingkatan nama kegiatan seperti contohnya untuk kegiatan stop perkawinan anak menjadi STOPAN Jabar yang artinya Stop Perkawinan anak di Jawa Barat

Tahap Communication

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara peneliti dengan responden pada tahap pelaksanaan komunikasi ini FADJABAR melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya dengan melakukan kegiatan seperti contohnya untuk isu perkawinan anak FADJABAR melaksanakan webinar perkawinan anak yang mana pesertanya adalah forum anak kota kabupaten, forum komunikasi OSIS, generasi berencana (genre). Webinar perkawinan anak ini diprogramkan oleh pengurus bidang/kluster 2 (dua) yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pengurus melakukan komunikasi dengan narasumber yang sudah direncanakan yaitu KPP PA dan perwakilan anak Jabar yang pernah mengikuti konferensi anak PBB yang pelaksanaannya di Amerika Serikat. Untuk narasumber diambil dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, perwakilan anak yang pernah mengikuti konferensi di Amerika Serikat (Putri Gayatri). Kegiatan tersebut dipandu oleh ketua bidang 2 (dua) FADJABAR sebagai moderator dan pembawa acara dari pengurus bidang 2 (dua) yang menangani issue perkawinan anak yaitu kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif., pada kegiatan tersebut juga peserta webinar diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan pandangan terkait perkawinan anak. adapun organisasi formal maupun non formal yang terlibat dalam implementasi *public relations* Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak. Adapun organisasi formal tersebut antara lain: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Dinas Perhubungan, BKKBN, Bapeda. Organisasi nonformal antara lain : LPA Jabar, Save The Children, Panti Asuhan/LKSA, CIMSA UNPAD, FOJB dan Forum Anak Kota Kabupaten. Respon mitra kerja terhadap public relations Forum Anak Daerah Jawa Barat cukup baik dan cukup banyak juga yang tertarik mengajak kolaborasi sampai mendukung kegiatan yang dilakukan baik dari segi dana maupun fasilitas yang memudahkan Forum Anak dalam merealisasikan program kerjanya namun ada juga mitra kerja yang kebingungan karena belum mengetahui sama sekali terkait provinsi layak anak. Pemahaman mitra kerja terhadap public relations Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak cukup baik, mitra kerja sangat memahami bahwa anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Daerah Jawa Barat sedang dalam proses belajar sehingga mereka membantu juga memberikan pemahaman terkait mewujudkan provinsi layak anak apabila anak-anak kurang tepat menyampaikan informasi dan apabila anak-anak tepat menyampaikan informasi dan melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan provinsi layak anak mereka mengapresiasi anak-anak FAD Jabar. Forum Anak Daerah Jawa Barat juga membangun komunikasi yang baik dengan mitra sehingga mitra dapat memahami program kerja yang dibuat oleh Forum Anak.

Berdasarkan hasil wawancara responden hambatan yang dihadapi pada tahap komunikasi Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mengimplementasikan public relations untuk mewujudkan provinsi layak anak antara lain : ketika seseorang yang diajak berkomunikasi tidak responsif dan malah mengabaikan tanggung jawabnya, Belum ada Latihan khusus untuk anak-anak sehingga terkadang saat komunikasi anak-anak menyampaikannya kurang tepat, anggaran yang kurang memadai dalam mendukung anak-anak mewujudkan provinsi layak anak. Cara mengatasinya yaitu FADJABAR meminta bantuan pada pengurus untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak responsive dan tanggungjawab tersebut dalam artian melakukan pendekatan untuk mengetahui penyebabnya sehingga bisa dicari solusinya. Disamping itu untuk menghadapi masalah tersebut Forum Anak berupaya untuk terus berlatih dalam komunikasi, merumuskan data yang baik, dan mendesign materi yang disampaikan secara menarik sehingga para mitra kerja percaya dan mendukung kegiatan Forum Anak dengan baik.

Tahap Evaluation

Mengevaluasi kegiatan komunikasi internal dan eksternal Forum Anak menurut para informan evaluasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, pertama evaluasi kegiatan yang baru dilaksanakan, dan kedua evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sekali. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja Forum Anak dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk evaluasi kegiatan yang baru dilaksanakan, cara evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melihat proses dari tahap pertama sampai tahap komunikasi sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Seperti contohnya evaluasi kegiatan webinar perkawinan anak, di lihat bagaimana tahap perencanaan sesuai tidak dengan tahap pelaksanaan komunikasi, respon dari peserta juga dilihat apakah sesuai dengan yang diharapkan, penampilan dari para narasumber juga dibahas apakah membuat paham atau sulit dimengerti, bukan hanya itu di evaluasi juga terkait dengan saluran webinar apa ada kendala atau tidak. Untuk evaluasi kegiatan yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali cara evaluasi internal Forum Anak dilakukan dengan pertemuan online dan offline. Dipertemuan tersebut masing-masing bidang melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan bidang yang lain menanggapi. Komunikasi dilakukan dengan sopan dan akrab apabila ada kekurangan ataupun hasil yang kurang memuaskan peserta rapat menyampaikannya dengan terbuka tanpa ada yang ditutupi. Evaluasi itu sendiri ada evaluasi secara internal dan evaluasi eksternal. Untuk evaluasi internal biasanya dilakukan dengan melihat tahapan yang sudah dilakukan, ada kekurangan dan kelebihannya bahkan dibicarakan juga terkait kendala yang dihadapinya. Apabila ada kekurangan dan kendala yang dihadapi maka hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi pengurus FADJABAR untuk tidak mengulang kembali kesalahan/kekurangan yang dilakukan, dan dijadikan masukan dalam tahap fact finding berikutnya. Evaluasi eksternal menurut informan dilakukan dengan cara bertanya pada mitra (stakeholders) terkait dengan keberpahaman pesan yang disampaikan oleh Forum Anak. Apabila ada yang tidak dipahami para stakeholders tidak sungkan untuk bertanya dan apabila Forum Anak melakukan hal yang baik para stakeholders tidak sungkan juga memberi apresiasi baik melalui kode tangan ataupun diberikan fasilitas seperti laptop, gitar,

ataupun alat permainan edukatif. Kewenangan implementasi public relations Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan responden ada pada beberapa pihak diantaranya; pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai Pembina dan pendamping dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat yang harus memberikan kesempatan pada anak-anak Forum untuk berkontribusi dalam mewujudkan provinsi layak anak, kewenangan pengurus FAD Jabar untuk saling belajar dan saling berbagi tugas, Masyarakat mendukung implementasi public relation Forum Anak Daerah Jawa Barat terlihat dari dukungan masyarakat dan mau mendengarkan saat kegiatan Forum Anak dalam mensosialisasikan provinsi layak anak dilakukan. Terkait pelatihan khusus public relations Forum Anak Daerah Jawa Barat informasi yang disampaikan oleh pendamping berbeda dengan pengurus dan fasilitator. Menurut informasi pendamping belum ada pelatihan khusus terkait public relation bagi Forum Anak Daerah Jawa Barat sementara menurut informasi dari pengurus dan fasilitator ada pelatihan yang dilaksanakan dari tingkat nasional dalam hal ini kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait mewujudkan Indonesia layak anak yang bisa terwujud apabila setiap provinsi sudah layak terhadap anak. Cara komunikasi agar public relation Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak dapat terwujud dengan cara diskusi internal dikalangan pengurus Forum Anak, kemudian diskusi dengan pendamping dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, setelah itu diskusi dengan instansi terkait perihal kegiatan yang akan dilaksanakan baik secara online (webinar, podcast, live Instagram) maupun offline. Saat melaksanakan komunikasi internal dan eksternal menurut informan terlebih dahulu pengurus Forum Anak melaksanakan rapat / pertemuan internal, dipertemuan tersebut dibicarakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, komunikasi internal dilakukan untuk memperkuat tim agar sama persepsi terkait dengan provinsi layak anak. Setelah komunikasi internal dilakukan Forum Anak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dengan mengerahkan para pengurus untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk komunikasi eksternal dilakukan oleh pengurus inti dalam hal ini ketua, wakil ketua dan sekretaris. Komunikasi eksternal dilakukan dengan didampingi oleh fasilitator maupun pendamping. Komunikasi eksternal pada mitra kerjasama disampaikan secara langsung baik melalui profil yang dibuat Forum Anak maupun melalui tulisan-tulisan yang sederhana dan jelas melalui ppt. tulisan tersebut dipresentasikan pengurus inti secara bergantian sesuai dengan yang direncanakan. Tahap evaluasi ini merupakan proses yang berkelanjutan dari proses pertama sampai keempat, dan tidak boleh lepas dari tahapan tersebut. Hambatan yang dihadapi pengurus FADJABAR pada tahap evaluasi ini yaitu saling menyalahkan apabila ada kekurangan dan terkadang lupa terkait administrasi seperti daftar hadir lupa tidak dishare. Cara mengatasi untuk menyalahkan teman biasanya ketua FADJABAR kumpul kemudian mengajak diskusi pengurus lainnya dan berbicara terkait bahwasannya evaluasi itu untuk ajang melihat kendala yang dihadapi dan mengurangi kendala tersebut sehingga tidak dilakukan kembali dikemudian hari/situasinya aman. Untuk hambatan yang dihadapi lainnya menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh FAD JABAR dengan membuat link dan meminta untuk peserta agar bisa mengisi form daftar hadir yang sudah disediakan secara online.

Kesungguhan pengurus Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi layak anak tercermin dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah Jawa Barat, kegiatan tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu diantara pengurus Forum Anak yang disesuaikan dengan tugas setiap bidang/kluster dalam kepengurusan, disamping dari kegiatan tercermin pula dari komunikasi maupun Kerjasama yang dilakukan pengurus dalam pelaksanaan kegiatan. Pembagian tugas dalam mengimplementasikan public relation Forum Anak Daerah Jawa Barat dapat terlihat dari bidang/kluster dalam kepengurusan Forum Anak Daerah Jawa Barat yang disesuaikan dengan indikator dari provinsi layak anak yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, kluster keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dan kesejahteraan dasar, kluster Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster perlindungan khusus. Disamping itu, ada juga pembagian tugas berdasarkan 5 (lima) wilayah yang ada di Jawa Barat yaitu wilayah Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning), Priangan Barat, Priangan Timur, Purwakarta dan Bogor.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi forum anak daerah Jawa Barat dalam mewujudkan forum anak Jawa Barat sudah di lakukan dengan baik, dimana sudah melakukan setiap tahap yang seharusnya di lakukan dalam proses dan pengembangan provinsi layak anak seperti melakukan :

1. Fact-finding dengan cara melakukan diskusi Bersama dengan membahas apa saja permasalahan atau aspirasi yang di dapatkan untuk Provinsi Layak Anak, setiap pengurus FAD JABAR mengumpulkan data yang di dapatkan dari instansi-instansi pemerintah terkait dan bermitra dengan FAD JABAR.
2. Planning and programming FAD JABAR yang sudah melakukan pembahasan masalah akan menyiapkan program kerja untuk mengimplentasikan hasil diskusi agar terjadinya perubahan positif.
3. Communication salah satu cara FAD JABAR mengimplementasikan program mereka untuk memberikan informasi prihal masalah anak dan pencegahan masalah anak melalui berbagaimacam media.
4. Evaluation dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif kinerja Forum Anak Jawa Barat dalam program yang sudah di laksanakan.

Maka dari itu forum anak daerah Jawa Barat sudah memenuhi standar – standar untuk membantu provinsi Jawa Barat menjadi daerah yang layak anak dengan dengan ini diharapkan kedepannya setiap pengurus forum anak Jawa Barat yang berdiskusi dan mengikuti kegiatan pembangunan kota layak anak dapat lebih aktif dan lebih inovatif serta dapat menyampaikan aspirasi – aspirasi anak yang sudah di terima dan di tamping kedalam wadah forum anak itu sendiri. Forum Anak terus di harapkan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah untuk menjadi wadah aspirasi anak yang ada di seluruh Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurrachman,Oemi.(1995). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [2] Anwar CR, Gani R, Andriani, Arkam NF. Pendidik, Pelajar dan Orangtua, Ketika Kelas Berada dalam Genggaman. *J Ris Public Relations* [Internet]. 2022 Dec 21;111–6. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPR/article/view/1356>
- [3] Danandjaja. (2011). *Peran Humas Dalam Perusahaan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- [4] Ishak, Aswad. (2012). Peran *Public Relations* Dalam Komunikasi Organisasi. *Jurnal Komunikasi*, Volume 1 Nomor 4, Januari 2012.
- [5] Lindeborg,R.A.(1994). *Excellent Communication. Public Relations Quartely*, Vol 39(1), 5-12, Spring Edition.
- [6] Nova,Firsan.(2011). *Crisis Public Relations*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [7] Patilima,Hamid.(2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 13 Nomor 1, Mei 2017. Hal 39-55.
- [8] Satlita,Lena. (2011). *Aktivitas Public Relations Dalam Rangka Membina Hubungan Baik Dengan Media Massa: staf pengajar pada program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. UGM. (2006).Media Public Relations*. Diakses dari beesmart.uny.ac.id/course/lenatslita/Protokol%20dan%20Etika%20Public%20Relations.pdf. Pada Tanggal 12 April 2022
- [9] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [10] Syahidah, Nadhira, and Maman Suherman. "Komunikasi Interpersonal Orang Tua dengan Anak Pecandu Gadget." (2021)
- [11] Wulandari Y. Depiction of Digital Safety Issues Between Parents and Adolescent in Banten Province. *J Ris Public Relations* [Internet]. 2022 Dec 21;133–42. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPR/article/view/1361>